



JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo)

Purnama Sari Br Sinulingga, Arthur Simanjuntak, Mitha Christina Ginting

Universitas Methodist Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Mei 2022

Disetujui Juni 2022

Dipublikasikan Juni 2022

Keywords:

Implementation of Government Internal Control System; Regional Financial Accounting System, Utilization of Information Technology; Apparatus Competence; Quality of Local Government Financial Reports.

Abstract

This study aims to examine the effect of applying the government's internal control system, regional financial accounting system, utilization of information technology, and apparatus competence simultaneously on the quality of local government financial reports at the Karo District Health Office. In this research method, the type of research used is causal associative research with a quantitative approach. The population in this study were all employees at the Karo District Health Office whose sampling technique used the saturated sampling technique. The data analysis method used is multiple linear regression with the help of SPSS 25. The analysis process carried out is data quality test, classical assumption test, and hypothesis testing. Based on the results of the study, it was found that the implementation of the government's internal control system had a significant positive effect on the quality of local government financial reports at the Karo District Health Office, the regional financial accounting system had a significant positive effect on the quality of local government financial reports at the Karo District Health Office. The use of information technology has a significant positive effect on the quality of local government financial reports at the Karo District Health Office. Apparatus competence has a positive and insignificant effect or in other words does not significantly affect on the quality of local government financial reports at the Karo District Health Office.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam

pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan kinerja.

Seiring perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, peran lembaga publik sangat penting, karena pemerintah adalah lembaga atau badan publik yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara, menjalankan kepemimpinan dan mengkoordinasikan kegiatan pusat dan pembangunan daerah serta masyarakat dari berbagai lembaga di mana mereka ditempatkan.

Pengelolaan keuangan yang baik sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk dapat mensejahterakan masyarakat, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara jujur dan nonteknis. Pemerintah harus bisa menjelaskannya kepada publik melalui laporan keuangannya. Semakin baik laporan keuangan yang disampaikan pemerintah, maka semakin besar pula akuntabilitas laporan keuangan pemerintah, sehingga kualitas laporan keuangan dinilai baik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa:

“Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Selain penerapan sistem pengendalian intern akuntansi pemerintah, faktor lain yang memberikan dampak terhadap tingkat kualitas laporan keuangan adalah sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur.

Menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah “Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.”

Kemudian, pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan pengguna sistem informasi dalam menjalankan fungsi atau perilakunya dalam menggunakan teknologi dalam konteks pekerjaannya (Thomson, et al., 1991). Sedangkan kompetensi aparatur adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan berdasarkan keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh perilaku dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut (Wibowo 2012).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi (keuangan) oleh unit akuntansi pemerintah daerah yang digunakan sebagai informasi informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan suatu lembaga entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkannya (Erlina, et., 2015).

Dalam rangka meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapatkan review tahunan berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat mengeluarkan empat jenis opini, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

Pemerintah daerah Kabupaten Karo yang juga berkewajiban menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggungjawab atas laporan keuangan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karo dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

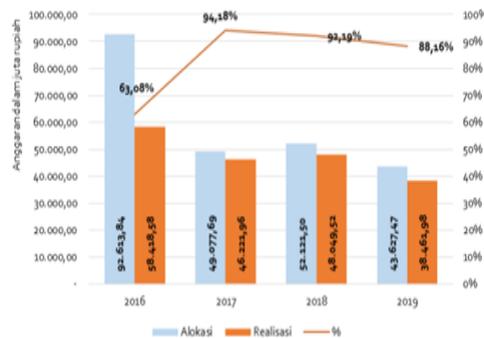


Gambar 1. LKPD Kabupaten Karo

Dilihat dari 5 tahun terakhir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ada memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karo pada tahun 2015. Pada tahun 2016 diberikannya opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), di sini ada penurunan opini yang sebelumnya Kabupaten Karo mendapatkan WDP di tahun 2015. Pada tahun 2017 dan 2018 LKPD Kabupaten Karo mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada tahun 2019 telah mengalami kenaikan tingkat opini yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti adanya perbaikan akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan PMK Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yaitu untuk mendukung pencapaian pembangunan yang menjadi fokus/prioritas nasional, dan meningkatkan peran provinsi dalam kerangka *good governance* dalam mengawal pelaksanaan program kementerian/lembaga di daerah dan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah melalui K/L mengatur pemberian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan.

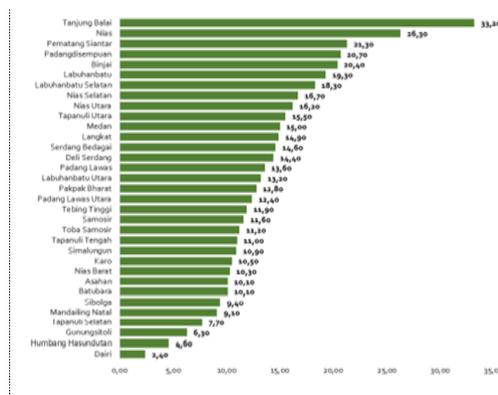
Realisasi anggaran dana dekonsentrasi kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2019 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2. Alokasi dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2019

Gambar 2 menunjukkan bahwa Alokasi dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 sebesar 63,08%. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan yaitu sebesar 94,18%. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan yaitu sebesar 92,19% dan pada tahun 2019 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 88,16%.

Berikut ini disajikan persentase anggaran kesehatan di Kabupaten/Kota dibandingkan dengan total anggaran APBD di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019.



Gambar 3. Persentase Total Anggaran Kesehatan Kab/Kota Terhadap Total APBD Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

Gambar 3 menunjukkan bahwa Kabupaten Karo hanya sebesar (10,50%) dan merupakan 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang terendah dalam persentase total anggaran di bidang Kesehatan yang seharusnya membantu mendanai urusan daerah yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional pada tahun 2019 yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2019 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karo. Namun, pada Persentase Total Anggaran Kesehatan Kab/Kota terhadap Total APBD Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Kabupaten Karo merupakan 10 (sepuluh) kab/kota yang terendah dalam pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Karo merupakan salah satu Dinas yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Belum lama ini diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Karo sedang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yang belum memenuhi kualitas yang dikehendaki. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut.

1. Tahap pengawasan belum berfungsi dengan baik.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah juga belum terlaksana dengan baik dan terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana seperti gedung dan peralatan kantor, dan tidak mempunya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi yang selalu menggunakan teknologi dan aplikasi yang terbaru sesuai dengan era globalisasi saat ini.
4. Kurangnya kompetensi aparatur yang mencakup seperti pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan/ketrampilan di bidang akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan latar belakang pendidikan pegawai yang bekerja disana berlatarbelakang di bidang kesehatan bukan di bidang akuntansi/keuangan.

Dari beberapa permasalahan yang terkait tersebut menyebabkan pelaporan keuangan triwulan maupun semester ke pemerintah pusat menjadi terhambat dan tidak terlaksana dengan baik.

(Sumber: Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, Saban Kemit S.KM, 2022)

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi manajemen dan kepemilikan rentan terhadap konflik antar agensi (Jensen dan Mackling, 1976). Dalam model keagenan, sistem dibangun dengan partisipasi kedua belah pihak, yaitu manajemen dan pemilik. Di sisi lain, manajemen dan pemilik mengadakan kontrak kerja untuk memenuhi utilitas yang diharapkan.

Lambert (2001) menyatakan bahwa “Keuntungan yang diterima kedua belah pihak didasarkan pada kinerja perusahaan.” Kinerja suatu perusahaan umumnya diukur dengan profitabilitasnya (Penman, 2003). Tingkat profitabilitas dikomunikasikan kepada pemilik oleh manajemen melalui penyajian laporan keuangan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa “Ada perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, sehingga agen tidak selalu menuruti keinginan prinsipal.”

Hubungan keagenan juga terjadi antara pemerintah, masyarakat sebagai agen, dan pemerintah sebagai prinsipal. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang hanya mementingkan pada pemerintah dan penguasa dengan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan warganya. Untuk mengurangi konflik, prinsipal harus memantau apa yang dilakukan agen. Pelaporan keuangan adalah seperti alat pemantauan untuk mengurangi biaya agensi.

Menurut Lane (2000), ia menyatakan bahwa “Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Dia berpendapat bahwa demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Menurut Moe (1984) yang menjelaskan bahwa “konsep ekonomi organisasi sektor publik menggunakan teori keagenan.”

Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mulyana (2010), kualitas didefinisikan sebagai “Kesesuaian dengan standar, diukur dengan tingkat ketidaksihinggaan dan dicapai melalui pemeriksaan.” Menurut Baridwan (2000), pelaporan keuangan daerah adalah “Ringkasan proses pencatatan, ringkasan transaksi keuangan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan.”

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi (keuangan) oleh unit akuntansi pemerintah daerah yang digunakan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan suatu lembaga entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkannya (Erlina, et., 2015).

Dalam PP No.71 Tahun 2010, PSAP No. 1 Paragraf 9 bahwa laporan keuangan merupakan “laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses integral atas tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan secara berkesinambungan oleh manajemen dan seluruh pegawai dalam rangka memberikan kepastian yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi melalui operasi yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengawasan kekayaan negara, dan kepatuhan. Terhadap peraturan perundang-undangan (Hasanah dan Fauzi 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah “poses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian tata cara mulai dari pendaftaran, pendataan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimaksudkan untuk menghasilkan informasi dalam berupa laporan keuangan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Nordriawan dan Hertianti 2010).

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Suyanto (2005) mendefinisikan teknologi informasi sebagai “Suatu bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu untuk membuat, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau mengirimkan informasi.” Winidyaningrum (2010) mengklasifikasikan penggunaan teknologi informasi sebagai berikut:

1. Pengolahan data elektronik, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja.
2. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan pengguna sistem informasi dalam menjalankan fungsi atau perilakunya dalam menggunakan teknologi dalam konteks pekerjaannya (Chintya, 2015).

Kompetensi Aparatur

Sutrisno (2014) menyatakan bahwa kompetensi adalah “Kemampuan yang didasarkan pada keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja dan penerapannya dalam pelaksanaan tugas dan yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan.” Sedangkan menurut Wibowo (2012) menjelaskan bahwa kompetensi “adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan berdasarkan keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dibutuhkan oleh pekerjaan.”

Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi menyebutkan bahwa kompetensi dapat diartikan “sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional.”

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengarahkan dan memantau serta memberikan jaminan dan kepastian yang memadai bagi tercapainya tujuan pemerintah secara efektif dan efisien, menyelenggarakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas baik, penyusunannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai sistem pengendalian intern pemerintah.

Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah menurut Mahmudi (2010) dalam buku “Manajemen Kinerja Sektor Publik” adalah sebagai berikut: “Untuk pelaporan, jasa keuangan pemerintah daerah dan proses sistem akuntansi dimana sistem pengendalian intern ditentukan, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan atau tidak dari sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah.”

Penelitian yang memperkuat hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Armel & Safitri (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₁: Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, dan pengikhtisaran transaksi atau peristiwa keuangan dan laporan keuangan dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Permendagri Nomor 13, 2006; 16-17) yaitu meliputi, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja APBD harus disusun atau dihasilkan dari sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal yang dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan aplikasi komputer. Menurut Mahmudi (2010), sistem akuntansi pemerintah daerah disusun sedemikian rupa untuk memastikan bahwa siklus akuntansi dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan atau masalah karena jika terjadi masalah pada bagian dari siklus akuntansi, maka akan menyebabkan hasil keuangan yang berkualitas lebih rendah.

Penelitian yang memperkuat hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti & Ningsih (2019) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₂: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai teknologi informasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk mengumpulkan, menyusun dan menyimpan data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, kuantitas, relevansi, akurasi dan ketepatan waktu. Penggunaan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan pengguna sistem informasi dalam menjalankan fungsi atau perilakunya dalam menggunakan teknologi dalam konteks pekerjaannya.

Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi kesalahan dalam pengolahan data, sehingga laporan keuangan menjadi handal. Menurut Nurillah dan Muid (2014), pemanfaatan teknologi informasi meliputi (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja dengan sarana elektronik, dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah akses pelayanan publik dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

Penelitian yang memperkuat hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mene, Karamoy, & Warongan (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

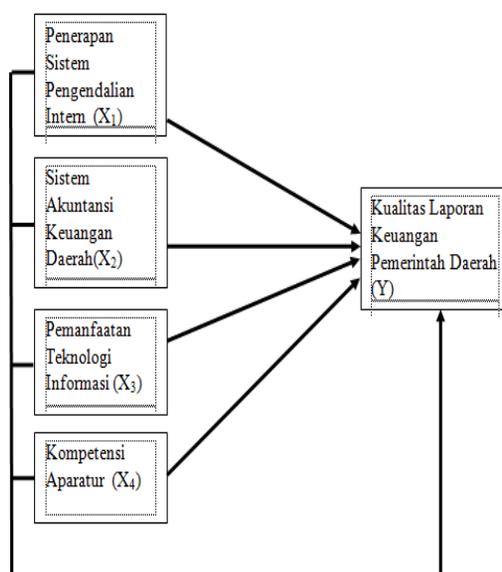
H₃: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi aparatur adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan berdasarkan keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh perilaku dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut. Kapasitas peralatan menjadi salah satu faktor kunci dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah, karena pengelola SAP dan SPIP adalah sumber daya manusia. Tidak peduli seberapa bagus sistem dan regulasinya, tetapi jika kapasitas personel untuk menegakkannya tidak cukup, hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan (Irwan 2011).

Penelitian yang memperkuat hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ngguna (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

H₄: Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Gambar 4. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian melalui kuesioner yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2018), sampel adalah “bagian dari totalitas karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi”. Sampel untuk penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa teknik sampling jenuh “adalah teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Metode pengambilan sampel ini dipilih untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dengan alasan populasi yang diteliti relatif kecil, sehingga sampel yang efisien dapat dipilih secara bebas. Sampel untuk penelitian ini adalah 86 responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui validitas dari sebuah angket (Ghozali, 2018). Maka disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing indikator dan komposisi total masing-masing mengindikasikan validitas yang kuat dari tiap variabel dengan adanya data r hitung $>$ r tabel yaitu validitas item seluruh pernyataan sudah dipastikan dan dapat digunakan.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan hanya terhadap item pertanyaan atau pernyataan yang valid. Uji reliabilitas dilakukan atas 40 butir pernyataan yang diuji secara statistik menggunakan nilai koefisien Cronbach's Alpha dengan bantuan program aplikasi SPSS. Suatu variabel dikatakan reliabel (dapat diterima) jika nilai koefisien Cronbach's Alpha $>$ 0,60.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item Pernyataan	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X ₁)	5	0.912	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₂)	8	0.944	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃)	6	0.936	Reliabel
Kompetensi Aparatur (X ₄)	11	0.898	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	10	0.959	Reliabel

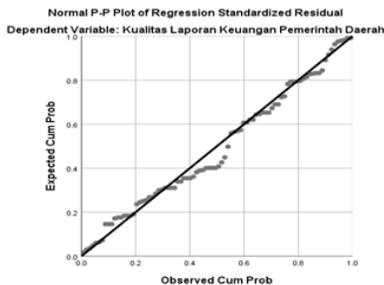
Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai koefisien Cronbach's Alpha untuk setiap variabel diatas 0,70 maka dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, karena kuesioner yang dirancang dapat mengungkapkan gejala tertentu pada waktu yang berbeda (Sekaran et al. Bougie, 2017).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilihat melalui grafik normal probability plot, apabila titik atau penyebaran data pada grafik membentuk suatu pola garis yang lurus atau mengikuti

garis diagonalnya maka data tersebut terdistribusi secara normal. Selanjutnya, uji normalitas juga dapat dilakukan melalui uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test dengan melihat tingkat signifikansinya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data terdistribusi normal dan begitu pula sebaliknya jika lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka data tidak berdistribusi secara normal.



Gambar 5. Hasil Uji Normalitas Probability Plot

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.69926956
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.059
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.175 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan pada Gambar 5 yaitu grafik *normal probability plot* dapat dilihat bahwa data (titik-titik) yang tersebar mengikuti garis diagonalnya. Kemudian juga dapat dilihat pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) yang diperoleh berdasarkan uji statistik adalah sebesar 0.175. Hal ini menunjukkan nilai yang diperoleh lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 5% atau 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik merupakan model yang di dalamnya tidak ditemukan adanya multikolinieritas. Untuk dapat mengetahui apakah terdapat multikolinieritas dalam model maka dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinieritas.

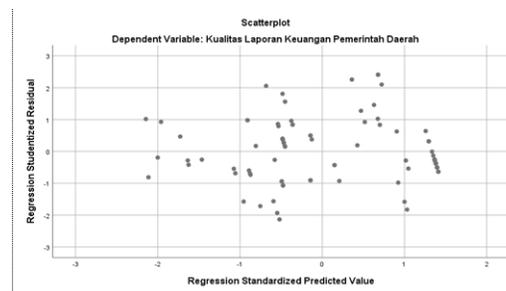
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)	0.452	2.210
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0.451	2.218
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0.413	2.419
Kompetensi Aparatur (X4)	0.750	1.334

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 3, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat bahwa untuk masing-masing variabel memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah model yang terbebas dari adanya heteroskedastisitas. Untuk dapat mengetahui apakah suatu model terdapat, atau tidak heteroskedastisitas maka dapat dilakukan dengan pengujian *scatterplot*, dimana jika tidak membentuk suatu pola tertentu atau titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa tidak membentuk suatu pola tertentu atau titik-titik yang terdapat pada grafik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Metode Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif dan analisis data dengan regresi linier berganda menggunakan software statistik SPSS versi 25.

Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Kualitas laporan keuangan pemerintah
- X1 : Sistem akuntansi keuangan daerah
- X2 : Kompetensi aparatur

- X3 : Pemanfaatan teknologi informasi
- X4 : Sistem pengendalian intern
- A : Konstanta
- B : Koefisien regresi
- ϵ : Koefisien error

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji-t dilakukan pada dasarnya adalah untuk melihat pengaruh masing masing variabel bebas secara parsial atau individual terhadap variabel terikat. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig. $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, begitu juga sebaliknya.

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-3.872	.000
	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	9.826	.000
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	2.787	.007
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	3.786	.000
	Kompetensi Aparatur	1.546	.126

Berdasarkan pada Tabel 4 maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan pengujian secara parsial yaitu:

1. Pada hasil pengujian statistik di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel penerapan sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebesar 9.826 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.98969. Oleh karena itu dikarenakan nilai dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9.826 > 1.98969$ dan nilai sig. $< 0,05$ yaitu $0.000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H_{a1} ditolak dan H_{01} diterima atau dengan kata lain penerapan sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Pada hasil pengujian statistik di atas, juga dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 2.787 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.98969. Oleh karena itu dikarenakan nilai dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.787 > 1.98969$ dan nilai sig. $< 0,05$ yaitu $0.007 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H_{a2} ditolak dan H_{02} diterima atau dengan kata lain sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Pada hasil pengujian statistik di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar 3.786 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.98969. Oleh karena itu dikarenakan nilai dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.786 > 1.98969$ dan nilai sig. $< 0,05$ yaitu $0.000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H_{a1} ditolak dan H_{01} diterima atau dengan kata lain pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Pada hasil pengujian statistik di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel kompetensi aparatur adalah sebesar 1.546 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.98969. Oleh karena itu dikarenakan nilai dari $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1.546 < 1.98969$ dan nilai sig. $> 0,05$ yaitu $0.126 > 0,05$, maka dapat disimpulkan H_{04} diterima dan H_{a4} ditolak atau dengan kata lain kompetensi aparatur secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

karena itu dikarenakan nilai dari $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1.546 < 1.98969$ dan nilai sig. $> 0,05$ yaitu $0.126 > 0,05$, maka dapat disimpulkan H_{a1} ditolak dan H_{01} ditolak yaitu kompetensi aparatur secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan atau dengan kata lain tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji-F dilakukan pada dasarnya adalah untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai sig. $F < 0,05$, maka Hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, begitu juga sebaliknya.

Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2721.751	4	680.438	1326.066	.000 ^b
	Residual	41.563	81	.513		
	Total	2763.314	85			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
b. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada Tabel 4 hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (X_1), sistem akuntansi keuangan daerah (X_2), pemanfaatan teknologi informasi (X_3) dan kompetensi aparatur (X_4) memiliki nilai F_{hitung} sebesar 1326.066 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,48. Oleh karena itu dikarenakan nilai dari $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $1326.066 > 2,48$ dan nilai sig. < 0.05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau dengan kata lain sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur, berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada dasarnya mengetahui kemampuan menjelaskan variasi dari variabel terikat. Range nilainya antara 0-1, jika nilai Adjusted R2 mini adanya keterbatasan dalam mengungkapkan, & kebalikannya jika Adjusted R2 besar berarti kemampuan variabel-variabel independen pada mengungkapkan variasi variabel dependen besar.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.992 ^a	.985	.984	.716	2.433

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada Tabel 6, nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0.948 atau 94.8%. Hal ini berarti kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh empat variabel bebas yaitu penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur sebesar 94.8%. Sisanya sebesar 5.2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
2. Sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
4. Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan tidak signifikan atau dengan kata lain tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
5. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur, berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terkait dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, karena hal tersebut memberikan dampak yang baik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
2. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap kompetensi aparatur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, seperti menempatkan pegawai ataupun orang yang bekerja sesuai dengan kemampuan untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menambah beberapa variabel independen lain yang juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti untuk menggunakan dinas atau badan yang lain sebagai objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. 2000. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: BPFE.
- Erlina, et. al., 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Ferdinan.2006. Structural Equation Modelling dalam penelitian Manajemen: Badan penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hatch, E., & Farhady, H. 1981. Research Design & Statistics for Applied Linguistics. Tehran: Rahnama Publications.
- Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Lane, J.E. 2000. The Public Sector – Concepts, Models and Approaches. London: SAGE Publications.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurdin, M. 2012. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Studi Pada Pt Pln (Perusahaan Listrik Negara) Persero Kota Malang (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Nurmalia H., & Achmad Fauzi. 2016. Akuntansi Pemerintah. Jakarta: IN MEDIA.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Penman, S.H. 2003. Financial Statement Analysis and Security Valuation. Second Editon: McGraw Hill.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13, 2006; 16-17 Tentang Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PMK Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- PP Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- PP No. 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian. Edisi 6, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ke-6. Kencana, Jakarta.
- Suyanto. 2005. Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis. Yogyakarta: ANDI.
- Wibowo. 2012. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ardianto, R., & Eforis, C. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi

- Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95-136
- Armel, RYG, Nasir, A., & Safitri, D. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). (Disertasi doktoral, Universitas Riau).
- Aprsiansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. 2020. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *Jambi Accounting Review*, 1(1), 44-62.
- Chintya, I. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok (Studi pada SKPD Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Hasanah, S., & Siregar, T. R 2021. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *JAKPI-Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(1), 39-47.
- Indarwati, T. 2020. Pengaruh Kompetensi, Disiplin dan Lingkungan Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Kantor Camat Denpasar Timur. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 90-103.
- Irwan. 2011. Pengaruh Pendekatan Problem Posing Model Search, Solve, Create and Share (SSCS) dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematis Mahasiswa Matematika. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 12(01): 1-13.
- Jensen, M., & Mackling, W. H. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 27.
- Karmila, K., Tanjung, A. R., & Darlis, E. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau). *Sorot*, 9(1), 25-42.
- Lambert, R.A. 2001. *Contracting Theory and Accounting*. *Journal of Accounting & Economics*, (32): 3 – 87.
- Mene, RE, Karamoy, H., & Warongan, JD 2018. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).
- Meutia, R., & Amar, M. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 155-169.
- Moe, T. M. 1984. *The New Economics Of Organization*. *American Journal of Political Science*. 28(5): 739-777.
- Ngguna, R. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pemanfaatan Informasi Keuangan Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu. *Jurnal Katalogis*, 5(12).

- Nurillah, A. S., & Muid, D. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 200-212.
- Pravasanti, Y. A., & Ningsih, S. 2019. Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo). *Aksar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 199-214.
- Situmorang, J. R. 2012. Pemanfaatan Internet Sebagai New Media Dalam Bidang Politik, Bisnis, Pendidikan Dan Sosial Budaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1).
- Sutrisno, E. 2014. Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi Di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 1-12.
- Thompson, et, al. 1991. Personal Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization. *Management Information System Quarterly*, 21(3), 125-143
- Wijayanti, W. S., Sjahruddin, H., & Razak, N. 2017. Pengaruh Karakteristik Individu dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*. 14-28.
- Winidyaningrum, C. 2010. Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA)*. STIE STP Pignatelli Surakarta.
- Yulistia, Y., Yanti, N., & Purwasih, I. 2017. Analisis Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Benefita*, 2(3), 179-193.
- Zalni, Z. 2021. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Akuntansi Akrual Dan Implementasi Simda Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kota Kendari. *Economix*, 9(1).